

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sementara itu “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah pemerataan pembangunan desa. Sehubungan dengan disahkannya UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa diberikan kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan desa serta pengelolaan keuangannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup desa. Sebagai instansi pemerintahan terkecil pemerintah desa juga wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai tugas dan kewajibannya sesuai dengan perencanaan yang disusun dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Laporan keuangan desa harus dibuat secara benar dan jelas agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Menurut keterangan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu desa mendapatkan bantuan dana sebesar 10% dari APBN. Dimana bantuan dana itu

tidak melalui perantara akan tetapi langsung mengalir ke desa-desa secara bertahap. Alokasi dana 10% dari APBN tersebut yang menjadi alasan peningkatan pendapatan desa. Tentunya jika dilihat dari peningkatan pendapatan desa maka perlu adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Seperti yang di maksud dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan keuangan desa.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa meliputi : anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan laporan realisasi anggaran (LRA). Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya: masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat. Laporan keuangan Pemerintah Desa disampaikan Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga semua program kerja dan kegiatan yang direncanakan dapat membantu kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang sesuai kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Menurut <https://djpk.kemenkeu.go.id> bahwa pada tahun anggaran 2021 pagu anggaran dana desa untuk Kabupaten Gresik adalah Rp. 287.422.375.000. Untuk tahun anggaran 2022 pagu anggaran dana desa sebesar Rp. 294.720.837.000 yang artinya ada kenaikan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 7.298.462.000. Hal tersebut membuat semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Gresik harus mempertanggungjawabkannya dengan bijak karena banyaknya dana yang disalurkan, caranya yaitu dengan mengelolanya dengan baik dan membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan yang berkualitas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu pertama relevan, informasi yang relevan memiliki

karakteristik: manfaat umpan balik, memiliki nilai prediktif, tepat waktu dan lengkap. Kedua yaitu andal, informasi di dalam laporan keuangan harus terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Karakteristik yang harus dilakukan yaitu penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Yang ketiga yaitu dapat dibandingkan, laporan keuangan yang berkualitas harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Keempat yaitu dapat dipahami, laporan keuangan yang berkualitas harus dapat dipahami oleh pengguna dan harus disesuaikan dengan pemahaman pengguna. Tujuan laporan keuangan yang berkualitas adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat yang digunakan untuk para pengguna dalam pengambilan keputusan serta untuk menyatakan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.

Berbagai macam permasalahan terkait kualitas laporan keuangan yang terjadi di desa-desa Kabupaten Gresik, diantaranya yaitu masih banyaknya penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan, setiap melakukan laporan keuangan per 6 bulan sekali, yang seharusnya laporan keuangan itu paling lambat harus dilaporkan pada tanggal 25 akhir bulan, tetapi pada kenyataannya malah lebih dari tanggal yang sudah ditentukan. Bahkan sampai di laporkan pada tanggal 30. Menurut Hanifah (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa masih banyak desa di Kabupaten Gresik salah satunya desa Kepatihan Kecamatan Menganti yang memiliki permasalahan terkait laporan keuangan desa diantaranya yaitu sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dari desa ke kecamatan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Armaningsih & Handayani (2019) yang menyatakan bahwa Desa Indrodelik Kecamatan Bungah untuk tahap pelaporan adanya keterlambatan pelaporan

dengan jadwal yang ditentukan terkait realisasi penggunaan ADD, Begitupun dengan tahap pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan untuk pembuatan LPJ maupun pelaporannya. Dari fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan Desa belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan (*timeliness*), keterlambatan tersebut dikarenakan sistem keuangan desanya (SISKEUDES) bermasalah. Mengingat bahwa keterandalan dan tepat waktu merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan. Minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola atau pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan serta kurangnya kompetensi perangkat desa, padahal mereka diharuskan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi dalam pembuatan laporan keuangan agar hasilnya berkualitas. Hal tersebut dirasa menarik bagi peneliti untuk melihat sejauh mana kualitas laporan keuangan yang akan diteliti serta terdapat pengaruh seperti Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Keuangan Desa yang dijalankan, sehingga faktor ini berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Peneliti memilih variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia karena hal tersebut sangatlah penting dan berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang dibuat. kompetensi diartikan sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kesuksesan organisasinya (Sahidah, 2020). Kesuksesan organisasi salah satunya adalah dapat membuat

suatu laporan keuangan berkualitas, dimana untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan suatu kompetensi sehingga dapat dengan mudah memahami langkah-langkah membuat suatu laporan keuangan yang tepat dan benar.

Selain variabel kompetensi sumber daya manusia, terdapat variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi. Alasan peneliti memilih variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu karena teknologi informasi memiliki hubungan terkait dengan kualitas laporan keuangan, dimana teknologi informasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu mempercepat proses pengelolaan keuangan atau dalam menyajikan laporan keuangan. Penggunaan teknologi informasi meliputi pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk memudahkan akses pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Kusumadewi, 2020). Kompetensi sumber daya manusia di pemerintahan desa khususnya desa-desa di Kabupaten Gresik berkaitan dengan teknologi informasi masih sangat kurang. Banyak yang belum paham komputer bahkan ada yang sama sekali tidak bisa mengoperasikan komputer jadi banyak aparatur desa yang melimpahkan tugasnya yang berkaitan dengan komputer kepada aparatur desa yang lainnya. Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam proses data, sehingga laporan keuangan menjadi andal.

Selain variabel pemanfaatan teknologi informasi, terdapat variabel sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Tingkat kualitas suatu laporan keuangan dapat ditentukan dari seberapa baik pengendalian internal di institusi pemerintahan itu sendiri. Jika pengendalian internal lemah atau rendah, maka akan sulit untuk mendeteksi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini bukti audit yang diperoleh pemerintah desa berdasarkan informasi akuntansi tidak akan valid. Sistem pengendalian internal tidak bertujuan untuk menghapus semua peluang akan terjadinya kesalahan atau kecurangan, akan tetapi sebuah sistem pengendalian internal yang baik akan menekan terjadinya sebuah kesalahan dan kecurangan dalam batas yang dianggap layak, serta misal hal tersebut terjadi maka akan segera teratasi. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) merupakan sesuatu yang diterapkan di seluruh lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa unsur yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian internal (Ikriyati & Aprila, 2019).

Dalam penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan keefektifan dan keefisienan dalam mengelola keuangan desa. Demi membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan membuat laporan keuangan desa, maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat aplikasi yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah desa. Fitur-fitur yang disajikan dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES (Sahidah, 2020). Pemrosesan penginputan dilakukan sekali sesuai dengan

transaksi yang ada, akan menghasilkan beberapa output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adanya SISKEUDES ini akan membantu pengelola keuangan desa dalam menyusun laporan keuangan, sehingga semakin memahami menggunakan SISKEUDES maka semakin kecil kesalahan material yang akan terjadi dan akan membuat laporan keuangan semakin berkualitas sehingga informasi yang ada di dalamnya dapat berguna bagi pengguna dan memudahkan pengguna mengambil sebuah keputusan yang baik.

Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lisda & Nurwulan (2018) menunjukkan bahwa secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang berkompetensi tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik, namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumadewi (2020) menunjukkan tidak adanya pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Ferdian (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan

untuk pengambilan keputusan, namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) menunjukkan tidak adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi keuangan daerah masih mengalami hambatan karena peralatan dan software pendukung yang masih sering mengalami kendala sehingga membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama dan berdampak pada jadwal waktu pelaporan yang mengalami kemunduran.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdian (2021) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dusun dalam wilayah Kecamatan Pelepat Ilir karena pada objek yang diteliti belum menerapkan pengendalian intern secara efektif dan menyebabkan informasi laporan keuangan yang dihasilkan kurang tepat. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ayem & Rofikoh (2020) menunjukkan adanya pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa karena untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan kegiatan pengendalian seperti melakukan pembinaan seperti melakukan kontrol secara rutin pada lingkungan pemerintahan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sahidah (2020) menyatakan bahwa penerapan SISKEUDES berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa karena Penerapan SISKEUDES akan mempermudah dalam membuat laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas dan untuk pengambilan suatu keputusan akan semakin mudah pula. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2021) yang

menyatakan bahwa aplikasi sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dusun dalam wilayah Kecamatan Pelepat Ilir.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Sulfiyah (2018) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan”. Perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu diantaranya adalah **pertama**, menambah variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi karena sesuai dengan keadaan saat ini manfaat teknologi informasi sangat dibutuhkan dengan adanya teknologi informasi mencakup adanya pengelolaan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah (Kusumadewi, 2020).

Kedua, menambahkan variabel Sistem Pengendalian internal karena dengan adanya sistem pengendalian yang baik dapat mencegah kecurangan akuntansi sehingga kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian internal merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir asimetri informasi dalam *theory agency* dengan cara *monitoring cost*. Dengan adanya variabel sistem pengendalian internal dapat mencegah kecurangan akuntansi, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi baik dan dapat meminimalisir asimetri informasi yang akan terjadi, pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik mampu meningkatkan keandalan informasi (Afifah, 2019).

Ketiga, menambah variabel Penerapan Sistem Keuangan Desa karena Melalui aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam

pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini juga merupakan alat untuk mewujudkan pengelolaan yang akuntabel, transparan dan partisipatif juga penggunaanya bersifat online (Ferdian, 2021).

Kabupaten Gresik memiliki 18 Kecamatan dan 330 Desa, dan 26 Kelurahan. Peneliti memilih Desa di Kabupaten Gresik karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia, dan terdapat beberapa kasus dan fenomena terkait pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan beberapa kasus dan fenomena yang terjadi terkait dengan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Gresik yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang kualitas laporan keuangan pemerintah desa yang ada di Kabupaten Gresik. Pada penelitian sebelumnya, juga masih terdapat inkonsistensi terkait hasil temuan. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yakni seluruh desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Gresik yang bermasalah dalam penyelesaian laporan pertanggungjawabannya. pada uraian yang dijelaskan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem keuangan desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Gresik**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
2. Apakah Pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?

3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?
4. Apakah Penerapan sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
2. Mengetahui pengaruh Pemanfaatan teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
3. Mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
4. Mengetahui pengaruh Penerapan sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya di bidang akuntansi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi referensi, dan memberikan kontribusi bagi peneliti yang akan datang serta memberikan tambahan temuan empiris terkait teori yang mendasari keterkaitan antar variabel.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Desa di Kabupaten Gresik untuk dijadikan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah desa.